

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1993).
- Attamimmi, A. Hamid S, *Ilmu Perundang – Undangan*, (Bandung: Grafika, 1990)
- Asshiddiqie, Jimly dan Saifuddin M. Ali, *Theory Hans Kelsen Tentang Hukum*, (Jakarta: Sekretariat Jenderal & Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006).
- Erwin, Muhamad, *Filsafat Hukum Refleksi Kritis Terhadap Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012).
- Gangga Santi Dewi, IGA, *Teori dan Praktek Hak Tanggungan*, (Semarang : UPT UNDIP Press Semarang, 2012).
- Harsono, Boedi, *Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*, (Jakarta: Djambatan, 2008).
- HS, H Salim, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2004).
- J, Satrio, *Hukum Jaminan, Hak-hak Jaminan Kebendaan*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993).
- Raharjo, Satjipto, *Ilmu Hukum*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2012).
- Soefwan, Sri Soedewi Masjuchun, *Beberapa Pokok Masalah Pelaksanaan Lembaga Jaminan di Dalam Praktek dan Pelaksanaannya di Indonesia*, (Yogyakarta: Fakultas Hukum UGM, 1997).
- _____, *Hukum Jaminan di Indonesia Pokok-pokok Hukum dan Jaminan Perorangan*, (Jakarta: BPHN Departemen Kehakiman RI, 1980).
- Soeprapto, Maria Farida Indrati, *Ilmu PerundangUndangan : Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*, (Yogyakarta: Kanisius, 2007).
- Soemitro, Ronny Hanitijo, *Metodelogi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990).

- Soeprapto, Hartono Hadi, *Pokok pokok Hukum Perikatan dan Hukum Jaminan*, (Yogyakarta: Liberty, 1984).
- Subekti, R, *Jaminan-jaminan untuk Pemberian Kredit (Termasuk Hak Tanggungan Menurut Hukum Indonesia)*, (Bandung: Cirta Aditya Bakti, 1996).
- Suardi, *Hukum Agraria*, (Jakarta: IBLAM, 2005).
- Syahdeini, Sutan Remy, *Hak Tanggungan, Asas-Asas, Ketentuan-Ketentuan Pokok dan Masalah Yang Dihadapi Oleh Perbankan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004).
- Syamsuddi, Aziz, *Proses Dan Teknik Penyusunan Undang-Undang*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011).
- Usman, Rachmadi, *Hukum Kebendaan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011).
- Manan, Bagir dan Kuntana Magnar, *Beberapa Masalah Hukum Tata Negara*, (Bandung: Alumni, 1997).
- Mertokusumo, Sudikno, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, (Yogyakarta: Liberty, 1996).

Jurnal

- Arifin, *Eksistensi Peraturan Daerah Dalam Sistem Hukum Nasional Dan Implementasinya Terhadap Otonomi Daerah*, Jurnal Ilmu Hukum : Legal Opinion, Edisi 1, Vol 3, 2015, hlm. 67
- Endah Cahayani, Sri, *Pembuatan Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan Tanpa Diikuti Akta Pemberian Hak Tanggungan*, Jurnal Hukum dan Kenotariatan, Vol 3 No 1, Februari 2019, hlm. 29-45.
- Gangga Santi Dewi, IGA dan Mira Novana, *Kebijakan Penjaminan Tanah Melalui Hak Tanggungan di Indonesia (Studi Penjaminan Hak Tanggungan Elektronik di Kabupaten Badung Provinsi Bali)*, Law, Development, & Justice Review, Vol. 3 No. 1, Mei 2020, hlm. 57-69.
- Irawan Febriansyah, Ferry, *Konsep Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia*, Jurnal Prespektif, Vol XXI, No 3, September 2016, hlm. 222.

- Jaya, I Wayan Paramarta dkk, *Pertanggung Jawaban Notaris Berkenaan Dengan Kebenaran Substansi Akta Otentik*. *Rechtidee*, Vol 12 No 2, Desember 2017, hlm. 267-285.
- Malikatun Badriah, Siti, *Problematisasi Pembebanan Hak Tanggungan Dengan Objek Tanah Yang Belum Bersertipikat*, *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, Jilid 45 No 3, Juli 2016, hlm. 173-180.
- Nadira, Nurul, *Pendaftaran Hak Tanggungan Elektronik Yang Akan Mulai Dilaksanakan Di Badan Pertanahan*, *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, Vol 17 No II, November 2019, hlm. 162-165.
- Natania, Dwina, *Penyampaian Akta Pemberian Hak Tanggungan Oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah Setelah Diberlakukannya Peraturan Menteri ATR/KBPN Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Pelayanan Hak Tanggungan Terintegrasi Secara Elektronik*, *Acta Diurnal : Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan* Vol 3 No 2, Juni 202, hlm. 273-291.
- Nurjannah, St, *Eksistensi Hak Tanggungan Sebagai Lembaga Jaminan Hak Atas Tanah (Tinjauan Filosofis)*, *Jurnal Jurisprudentie*, Vol 5 No 1, Juni 2018, hlm. 195-205.
- Noor Aditama, Purna, *Tanggung Jawab Pejabat Pembuat Akta Tanah Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak Pada Peralihan Hak Atas Tanah Melalui Jual Beli*, *Lex Renaissance*, Vol 3 No 1, Januari 2018, hlm. 189-205.
- Putri Andriani, Cicilia dan Djumadi Purwoatmodjo, 2019, *Akibat Hukum Pemisahan Asas Horizontal Dalam Peralihan Hak Atas Tanah*, *Jurnal Notarius*, Vol. 12 No. 2, hlm. 703-717.
- Triyono, *Tanggung Jawab Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Dalam Pembuatan Akta Jual Beli Tanah dan Implikasi Hukumnya Bagi Masyarakat Umum*, Al Qodiri : *Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan*, Vol 17 No 2, Agustus 2019, hlm. 167-192.
- Vina Amalia, Nailu dkk, *Analisis Ketentuan Hak Tanggungan Elektronik Pada Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Pelayanan Hak Tanggungan*, *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, Vol 05 No 332-339, Desember 2020, hlm. 332-339.
- Wiguna, I Wayan Jody Bagus, *Tinjauan Yuridis Terkait Pendaftaran Hak Tanggungan Secara Elektronik*, *Acta Comitatus : Jurnal Hukum Kenotariatan*, Vol 5 No. 1, April 2020, hlm. 79-88.
- Zerlinda Anggraeni, Shirley dan Marwanto, *Kewenangan dan Tanggung Jawab Hukum Pejabat Pembuat Akta Tanah Dalam Pelaksanaan Pendaftaran Hak Tanggungan Secara Elektronik*, *Acta Comitatus : Jurnal Hukum Kenotariatan*, Vol 5 No. 2, Agustus 2020, hlm. 261-272.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Dasar-Dasar Pokok Agraria (UUPA).

Undang-Undang No 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah.

Undang-Undang No 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Undang-Undang No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penerapan Tanda Tangan Elektronik.

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor Nomor 5 Tahun 2020 tentang Hak Tanggungan Terintegrasi Secara Elektronik.

Petunjuk Teknis Nomor 2/Juknis-400.HR.02/IV/2020 Tentang Pelayanan Hak Tanggungan Terintegrasi secara Elektronik.